

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN OLEH DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU**

Toni Syahputra

NPP. 31.0169

*Asdaf Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

*Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: [tonisyahputra2019@gmail.com](mailto:tonisyahputra2019@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Samsul Arifin, S,Pd., MM.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Bengkalis Regency is one that has marine resource potential with fishing as one of the main livelihoods in Bengkalis Regency. However, the current problem is that the income of the fishing community is still low, which has not been able to support life as a whole and is far from being prosperous, so empowerment programs are needed for the fishing community to improve their welfare. **Purpose:** This research aims to determine, analyze and describe efforts to overcome obstacles in empowering fishing communities in improving welfare by the Fisheries Service of Bengkalis Regency, Riau Province. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods. Data collected through interview, observation and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results:** Research findings show that the Bengkalis Regency Fisheries Service has carried out empowerment activities, but there are still several problems that have resulted in the implementation of empowerment programs for fishing communities in improving their welfare to the maximum. **Conclusion:** This research concludes that there are inhibiting factors in empowering fishermen by the Bengkalis Regency Fisheries Service, including a limited budget, travel distance between fishing ports, lack of quality and quantity of human resources and a lack of interest and motivation from the community regarding activities carried out by the department. As well as several efforts made by the Bengkalis Regency Fisheries Service to overcome these obstacles, including the government becoming a facilitator for fishing communities, the government also carrying out guidance and training for fishing communities as well as increasing the quality and quantity of human resources for fisheries technical apparatus.

**Keywords:** Fishermen, Empowerment, Welfare, Bengkalis Regency

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu yang memiliki potensi sumber daya laut dengan nelayan sebagai salah satu mata pencaharian utama di Kabupaten Bengkalis. Namun permasalahan saat ini masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan yang belum mampu menunjang kehidupan secara menyeluruh dan jauh dari kesejahteraan sehingga diperlukan program-program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan tersebut agar kesejahteraannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah melakukan kegiatan pemberdayaan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut secara maksimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pemberdayaan nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis antara lain anggaran yang masih terbatas, akses jarak perjalanan antar pelabuhan perikanan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan masih kurangnya minat serta motivasi masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Serta beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya pemerintah menjadi fasilitator bagi masyarakat nelayan, pemerintah juga melaksanakan pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat nelayan serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur teknis Perikanan.

**Kata kunci:** Nelayan, Pemberdayaan, Kesejahteraan, Kabupaten Bengkalis

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, dengan 30% wilayah daratan dan 70% wilayah lautan (Jenawi & Ferizone, 2019). Indonesia memiliki luas perairan yaitu 14 juta Ha dengan rincian pembagiannya yakni 11,95 juta Ha meliputi sungai dan rawa, 1,78 juta Ha yang meliputi danau alam dan 0,3 juta Ha danau buatan dengan berbagai macam jenis ikan di dalamnya. Maka dari itu, Sebagian besar penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai nelayan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota administratif yang letaknya berada di wilayah pesisir pantai yang secara geografis berhadapan dengan Selat Malaka (BPS Kabupaten Bengkalis, 2016: 3).

Dapat diamati dari data Perikanan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi perikanan yang menjanjikan. Kabupaten Bengkalis di dominasi oleh masyarakat nelayan asli. Nelayan asli adalah Masyarakat nelayan yang bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan jual beli dalam skala kecil. Namun, jumlah Rumah Tangga nelayan meningkat dan menurun setiap tahunnya yakni Pada tahun 2018 rumah tangga nelayan berjumlah 2.945, pada tahun 2019 rumah tangga nelayan mencapai 3.036 mengalami peningkatan sebesar 2,9%, pada tahun 2020 rumah tangga nelayan mencapai 4.288 mengalami peningkatan sebesar 29,1%, pada tahun 2021 rumah tangga nelayan mencapai 4.808 mengalami peningkatan sebesar 10,8 % dan pada tahun 2022 rumah tangga nelayan berjumlah 4.571 mengalami penurunan sebesar 4,9 %.

Terlihat jelas bahwa masyarakat nelayan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun tingkat pengelolaan perikanan semakin menurun dan pendapatan yang diperoleh rendah. Maka dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diharapkan potensi yang dimiliki mampu meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan saat ini masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan yang belum mampu menunjang kehidupan secara menyeluruh dan jauh dari kesejahteraan sehingga diperlukan program-program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan tersebut agar kesejahteraannya. Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan pra-penelitian dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 bahwa pemberdayaan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis saat ini sedang berjalan tahap demi tahap. Berbagai program dijalankan sesuai dengan bidang-bidang pada dinas tersebut.

Namun pelatihan dan pembinaan ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena ada beberapa kendala yang membuat Dinas Perikanan harus memiliki kinerja ekstra dalam pelaksanaannya. Dan masih banyaknya nelayan yang kesulitan dalam mendapatkan informasi dalam kegiatan program tersebut. Karena memang kebanyakan nelayan merupakan masyarakat dari kalangan yang sudah cukup berumur dan tidak semua masyarakat dapat menggunakan teknologi seperti saat ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang terkadang tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan pembinaan dan pelatihan tersebut. Tetapi tidak hanya itu saja, terkadang ada juga para nelayan yang kurang berminat mengikuti kegiatan seperti ini. Dan tim dari Dinas Perikanan pun tidak bisa memaksakan hal tersebut. Sehingga pelaksanaan pembinaan dan pelatihan ini dapat dikatakan belum terlaksana sesuai dengan harapan dari pemerintah. Kerja sama antara pihak dinas perikanan dengan perusahaan atau kemitraan masih kurang. Karena pada dasarnya hasil tangkap perikanan diolah dan dikelola sendiri oleh nelayan tersebut.

## **1.3 Penelitian terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan. Pertama, penelitian Kamarullah (2022) berjudul Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis dengan hasil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki hambatan yaitu Sumber

Daya Manusia (SDM) dari nelayan itu sendiri dimana nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung lebih memilih untuk menggunakan cara penangkapan ikan dengan cara tradisional.

Kedua, penelitian Ferdinanda Mesait Isir (2022) berjudul Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Klaligi Kota Sorong dengan hasil Dinas Kelautan dan perikanan di kelurahan klaligi dalam pemberdayaan Masyarakat melalui memberikan penyuluhan, pendampingan dan kemitraan usaha. Dari tiga peran tersebut masih memiliki beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Hal itulah yang menghambat proses perkembangan perekonomian di kelompok Masyarakat nelayan.

Ketiga, penelitian Endi Musa (2022) berjudul Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan hasil pemberdayaan berupa bantuan dana tunai, bantuan alat berlaut, kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan lainnya. Sudah banyak nelayan yang mendapatkannya dan sangat bermanfaat bagi nelayan khususnya para nelayan Di kelompok nelayan Mina Jaya Kelurahan Kangkung. Para Nelayan membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung.

Keempat, penelitian Zarita Kaulika R Wattimena, Rustadi, Suadi (2022) berjudul Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan dengan hasil pemberdayaan nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan, belum memberikan hasil positif bagi kondisi perekonomian keluarga nelayan, yang ditunjukkan oleh 4 indikator ketahanan ekonomi keluarga yaitu : tempat tinggal, pendapatan keluarga, pendidikan anak, jaminan kesehatan keluarga.

Kelima , penelitian S. Arifianto dan Udi Rusadi (2013) berjudul Pemberdayaan Nelayan Tradisional Melalui Media Komunikasi dan TIK di Pantai Selatan Jawa dengan hasil pemberdayaan ini tidak sejalan dengan perkembangan TIK yang harusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan di semua sektor dan subsektor nelayan termasuk nelayan tradisional di pantai selatan jawa. Pemanfaatan media komunikasi dan TIK memiliki potensi dan berpengaruh terhadap sistem penangkapan, pengolahan, dan distribusi produk hasil tangkapan ikan, khususnya ketika terjadi anomali cuaca.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diteliti menunjukkan adanya perbedaan dan pembaharuan dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini berfokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang artinya penelitian ini berbeda pada lokasi penelitiannya. Serta teori yang peneliti gunakan yaitu teori pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi sebagaimana menurut Suharto (2004), Pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebianto (2012), Kesejahteraan menurut Sunarti (2006), Nelayan menurut Sastrawidjaya (2002), Nelayan tidaklah satu kesatuan, mereka terdiri dari beberapa kelompok menurut Mulyadi (2005). Pada penelitian ini peneliti berfokus pada masyarakat nelayan asli yang ada di Kabupaten Bengkalis. Berbeda dengan Penelitian sebelumnya berfokus pada kelompok Masyarakat Nelayan.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna untuk menemukan bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## **II. METODE**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang mana dalam hal ini penulis menjelaskan dan mendeskripsikan terkait pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini mengikuti beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Moleong (2006) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengamati peristiwa-peristiwa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik melalui deskripsi verbal dan linguistik, secara keseluruhan, bentuk alam khusus dan menggunakan berbagai cara alami. Penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan untuk keperluan ataupun kepentingan menurut Sugiyono (2010). Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan mendalam tentang proses pemberdayaan tersebut. Melalui wawancara, peneliti akan mendapatkan pandangan langsung dari berbagai informan yang terkait dengan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Bengkalis.

Sumber data primer dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para nelayan dan pihak terkait lainnya. Observasi non-partisipatif akan dilakukan untuk melihat langsung aktivitas nelayan dan pemberdayaan di lapangan. Dokumentasi terkait aktivitas nelayan, seperti laporan dan catatan kegiatan, juga akan digunakan sebagai sumber data primer (Sugiyono, 2021). Sumber data sekunder yang digunakan akan melibatkan catatan dan laporan terkait kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti berupa data yang didapatkan dari adanya dokumen dari pemerintah maupun Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terkait sarana dan prasarana maupun bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan oleh dinas terkait sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 8.628,06 km<sup>2</sup>,

terdiri dari pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 3 pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Letak Kabupaten Bengkalis ini sangat strategis, karena disamping berada pada alur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Thailand (IMS-GT). Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11(sebelas) kecamatan. Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 sebanyak 584.916 jiwa.

### **3.2 Pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**

Peneliti akan menganalisis terkait pemberdayaan Masyarakat nelayan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto yang mana terdapat empat lingkup pemberdayaan yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Sebagaimana dari hasil pengamatan serta informasi dan data yang didapatkan oleh peneliti maka penting pemberdayaan Masyarakat nelayan ini dilakukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

#### **3.2.1 Bina Manusia**

##### **3.2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan menyatakan bahwa :

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bengkalis merupakan prioritas utama. Dinas memiliki beberapa pendekatan yang diterapkan. Pertama, meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan serta manajemen sumber daya laut. Kedua, bekerja sama dengan daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur dan akses transportasi. Ketiga, menyediakan bantuan pendanaan dan modal bagi nelayan melalui berbagai program pemerintah. Keempat, menyelenggarakan berbagai pelatihan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengolahan hasil perikanan, hingga manajemen usaha bagi para nelayan. Dinas juga memiliki program khusus untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada perempuan pesisir, baik sebagai nelayan maupun sebagai pengolah hasil perikanan. Peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam keberlanjutan sektor perikanan, dan upaya untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis saat ini sedang berjalan

tahap demi tahap. Berbagai program dijalankan sesuai dengan bidang-bidang pada dinas tersebut. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para nelayan dalam proses pekerjaannya dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup nelayan sehingga segala bentuk kebutuhan dan kepentingan dalam hidupnya dapat terpenuhi pula.

### **3.2.1.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Rata-rata, tingkat pendidikan nelayan di Kabupaten Bengkalis berkisar antara tingkat SD hingga SMA. Meskipun memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam praktik-praktik perikanan, tingkat pendidikan yang relatif rendah ini dapat menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan di daerah ini. Kendala ini terutama terlihat dalam pemahaman konsep-konsep modern terkait manajemen usaha, teknologi, dan praktik berkelanjutan dalam industri perikanan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan di Kabupaten Bengkalis. Perlu memperhatikan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan para nelayan, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan ini dan berkembang serta berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat nelayan yang ada di kabupaten Bengkalis memiliki tingkat pendidikan yang tidak mampu untuk mereka selesaikan hanya sebatas tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi yang tidak memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan mereka. Sehingga membuat sebagian dari Masyarakat nelayan tersebut memilih untuk bekerja agar segala bentuk kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

### **3.2.1.3. Pendapatan Masyarakat Nelayan di kabupaten Bengkalis**

Terkait pendapatan nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis peneliti mendapatkan beberapa informasi salah satunya masyarakat nelayan yang ada di Desa Pangkalan Batang pada hari Rabu, 10 Januari 2024, dengan Bapak Izan yang mengatakan bahwa :

Dalam menangkap ikan biasanya para nelayan menggunakan kapal milik pribadi dan untuk hasilnya langsung dijual di pinggir jalan di dekat rumah. penghasilan yang didapat tergantung cuaca dan hasil tangkapan. Rata-rata hasil tangkapan yang langsung dijual dan hasilnya nya sekitar Rp. 1.000.000-Rp.3.000.000. Dengan hasil segitu cukup membantu menafkahi keluarganya sampai sekarang.

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis merasa sudah cukup dengan hasil tangkap yang mereka jual. Pendapatan ataupun penghasilan yang mereka dapatkan memang tidak semua dikatakan cukup besar. Tetapi bagi mereka dengan pendapatan dan penghasilan dari hasil jual tangkapan mereka cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat terjadi karena memang sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis merupakan seorang Nelayan. Sehingga, hasil produktivitas yang mereka hasilkan terkadang memiliki kesamaan dengan nelayan yang lain. Oleh karena itu, pendapatan dan penghasilan yang mereka peroleh menjadi tidak menentu.

### **3.2.2 Bina Usaha**

#### **3.2.2.1. Pelatihan dan Pembinaan bagi Masyarakat Nelayan**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Diadakannya serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha para nelayan. Dalam pelatihan ini, tenaga pendamping yang ahli dan berpengalaman dari Dinas Perikanan dan Kementerian terlibat langsung dalam memberikan bimbingan di lapangan. Mereka memberikan dukungan teknis kepada para nelayan, membantu mereka memahami berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha perikanan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu nelayan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap mental yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kuat bagi para nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar lokal maupun global.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan lingkup bina usaha Dinas Perikanan telah mencoba melakukan dan memberikan pembinaan, pelatihan, dan membimbing nelayan agar dapat terus semangat dalam meningkatkan keterampilan serta kualitasnya guna meningkatkan hasil pendapatan. Namun pelatihan dan pembinaan ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena ada beberapa kendala yang membuat Dinas Perikanan harus memiliki kinerja ekstra dalam pelaksanaannya. Dan masih banyaknya nelayan yang kesulitan dalam mendapatkan informasi dalam kegiatan ini. Karena memang kebanyakan nelayan merupakan masyarakat dari kalangan yang sudah cukup berumur dan tidak semua masyarakat dapat menggunakan teknologi seperti saat ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang terkadang tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan pembinaan dan pelatihan tersebut. Tetapi tidak hanya itu saja, terkadang ada juga para nelayan yang kurang berminat mengikuti kegiatan seperti ini. Dan tim dari Dinas Perikanan pun tidak bisa memaksakan hal tersebut. Sehingga pelaksanaan pembinaan dan pelatihan ini dapat dikatakan belum terlaksana sesuai dengan harapan dari pemerintah

### **3.2.2.2. Bentuk Kerja Sama Kemitraan**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Ada kerja sama dengan pihak Universitas Riau dalam pemasaran dan pengolahan hasil tangkap. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak Universitas Riau (UNRI) tidak hanya berfokus pada pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang penting dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis. Universitas menjadi mitra strategis dalam menyediakan pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan, serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dapat disimpulkan bahwa memang kerja sama antara pihak dinas perikanan dengan perusahaan atau kemitraan masih kurang. Karena pada dasarnya hasil tangkap perikanan diolah dan dikelola sendiri oleh nelayan tersebut. Sehingga hal inilah yang seharusnya dapat ditingkatkan lagi guna peningkatan dan pengembangan. Dan pada dasarnya dengan adanya kerja sama akan lebih memberikan kemajuan yang saling menguntungkan.

### **3.2.2.3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Nelayan di Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan langsung berupa alat tangkap yang di gunakan untuk memudahkan memperoleh hasil tangkapan. Bantuan ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses penangkapan ikan. Selain itu, ada juga bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yaitu berupa 10 unit kapal fiber berukuran 1 gross tonnage (GT). Bantuan ini tidak hanya membantu meningkatkan aksesibilitas nelayan ke wilayah penangkapan yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha perikanan secara lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut secara bertanggung jawab.

Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas bahwa untuk sarana dan prasarana masyarakat nelayan asli menggunakan kapal atau alat tangkap milik pribadi yang mereka beli sendiri, namun dari pihak Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat

tangkap untuk mengganti atau meningkatkan kualitas hasil tangkapan.

Berdasarkan indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa bina usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat berupa kegiatan pembinaan, dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan serta kualitas masyarakat nelayan maupun hasil tangkap,serta pemberian bantuan alat tangkap dan kapal fiber. Tetapi ini belum dapat terlaksana secara keseluruhan bagi setiap masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat terjadi karena sarana dan prasarana belum memadai serta anggaran yang belum mencukupi.

### **3.2.3 Bina Lingkungan**

#### **3.2.3.1. Tanggung Jawab dan Kemampuan Nelayan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Laut**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah aktif dalam memberikan peringatan dan sosialisasi mengenai praktik-praktik yang dapat merusak ekosistem laut. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, para nelayan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut bagi kelangsungan hidup mereka sendiri dan generasi mendatang. Mereka diberikan informasi tentang dampak negatif dari overfishing, pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta polusi laut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, diharapkan para nelayan dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam upaya pelestarian sumber daya laut dan keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa segala bentuk pertanggung jawab terhadap perikanan itu merupakan hak dan kewajiban dari masyarakat nelayan itu sendiri. Karena,pada dasarnya kapal dan aktivitas tangkap yang ada di Kabupaten Bengkalis bersifat pribadi atau personal. Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa terkait bina lingkungan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat berupa kegiatan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada dilapangan guna terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan terjaga nya ekosistem laut.

### **3.2.4 Bina Kelembagaan**

#### **3.2.4.1. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di

ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Banyak masyarakat nelayan asli yang menolak untuk bergabung ke dalam kelompok nelayan, baik itu koperasi atau organisasi serupa, dengan alasan bahwa hasil yang diperoleh dari bergabung ke kelompok tersebut kadang-kadang lebih kecil dibandingkan dengan menjual hasil tangkapan secara mandiri. Mereka merasa bahwa dengan menjual hasil tangkapan secara individu, mereka dapat lebih leluasa menetapkan harga jual dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa bergabung ke dalam kelompok nelayan akan membuat mereka terikat pada aturan dan keputusan kolektif yang mungkin tidak selalu menguntungkan bagi mereka secara individu.

Peneliti juga mewawancarai salah seorang nelayan yaitu Bapak Irwan dan mengatakan bahwa: “menjual hasil tangkapan secara pribadi dan langsung lebih menguntungkan dari pada harus bergabung ke kelompok nelayan. Pembeli hasil tangkapan langsung ini juga lebih banyak karena hasil tangkapan yang masih sangat segar.” Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa bina kelembagaan terkait pemberdayaan Masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan tidak berjalan dengan baik dikarenakan Masyarakat nelayan yang belum mau untuk mengikuti program dari pemerintah.

### **3.3 Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**

Setiap segala bentuk kegiatan ataupun program yang dibentuk pasti memiliki kekurangan ataupun kendala yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut. Sebagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa :

Kendala yang dihadapi dinas saat ini yang mendasar yaitu anggaran daerah yang kurang mencukupi. Sehingga saat adanya masukan atau usulan dari masyarakat nelayan hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi dinas. Tetapi dalam menyikapi hal tersebut dinas selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan ini.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kepala bidang bina mutu usaha pengolahan dan pemasaran ibu Susi Fenyanti, S.Pi pada pada hari senin, 8 Januari 2024 dan mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, keterbatasan bahan baku, dan tingginya harga modal yang

diperlukan untuk mengembangkan usaha. Rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil menjadi hambatan utama. Harga modal yang tinggi juga menjadi hambatan besar, terutama bagi para nelayan dan pengusaha kecil yang mungkin kesulitan untuk mengakses modal yang diperlukan.

Sehingga dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis diantaranya yaitu:

1. Anggaran yang terbatas. Setiap tahunnya anggaran yang diterima dinas belum tentu mampu mencukupi bentuk permintaan, masukan, dan usulan masyarakat nelayan.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terampil.
3. Akses perjalanan antar pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis juga menjadi kendala bagi dinas untuk melaksanakan program yang dibentuk. Keterbatasan serta kesulitan bagi dinas menempuh setiap lokasi pelabuhan yang ada di beberapa daerah yang memang membutuhkan tenaga dan biaya untuk mengunjunginya.
4. Kurangnya tim atau petugas penyuluhan juga menjadi kendala bagi dinas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, maupun pembinaan. Kemampuan serta kualitas dari petugas yang juga masih perlu ditingkatkan. Memang dinas telah membentuk berbagai tim untuk pelaksanaan kegiatan ini di beberapa daerah. Tetapi tim tersebut pun belum memadai untuk setiap Pelabuhan nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
5. Minat serta keinginan masyarakat nelayan pun masih belum besar dengan adanya kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan ini. Padahal kegiatan ini mampu memberikan ilmu serta pengetahuan bagi para nelayan untuk dapat meningkatkan hasil tangkapnya. Hal inilah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab bagi dinas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan.

### **3.4 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**

Berkaitan dengan adanya permasalahan atau kendala dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis maka tidak terlepas pula dari upaya dalam mengatasi kendala serta hambatan tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai serta mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dari hasil wawancara telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Ibu Hj. Kholijah, S.Pd.I pada hari Senin, 8 Januari 2024 di ruangan Kepala Dinas Perikanan terkait Tingkat Pendidikan nelayan dan menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dinas sejauh ini adalah bergerak sebagai pemerintah yang mampu memfasilitasi kegiatan masyarakat nelayan. Apa yang dibutuhkan oleh nelayan diusahakan dengan berbagai cara. Dalam hal ini dinas maupun pemerintah berusaha untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat nelayan berkaitan dengan kondisi mereka di lapangan.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kepala bidang bina mutu usaha pengolahan dan pemasaran ibu Susi Fenyanti, S.Pi pada pada hari senin, 8 Januari 2024 dan mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dinas yaitu tetap terus menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pelatihan untuk para nelayan, menyediakan bantuan pendanaan dan modal melalui berbagai program kerja sama perbankan untuk nelayan mendapatkan kredit usaha. Contohnya adanya BBM bersubsidi untuk nelayan dengan menunjukkan Kartu Nelayan Sejahtera yang bekerja sama dengan pihak Pertamina dan BRI.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Adapun yang dapat peneliti simpulkan upaya yang dilakukan Dinas Perikanan yaitu :

1. Upaya pemerintah sebagai pemberi fasilitas ini dapat berupa pemberian bantuan berupa alat tangkap, kapal fiber dan lain sebagainya. Upaya ini memang belum terlaksana secara maksimal. Dalam hal memberikan fasilitas bersangkutan pula dengan anggaran yang ada. Namun semua tidak terlepas dari itu, pemerintah akan terus berusaha mewujudkan semua kebutuhan dari para masyarakat nelayan.
2. Menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pelatihan untuk para nelayan sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, menyediakan bantuan pendanaan dan modal melalui berbagai program kerja sama perbankan untuk nelayan mendapatkan kredit usaha.
3. Meningkatkan kemauan dari masyarakat nelayan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan. Dinas terus berusaha mencari materi ataupun pembinaan serta pelatihan yang menarik bagi masyarakat yang mana dapat membuat mereka berminat dan termotivasi dalam kegiatan tersebut
4. meningkatkan kualitas serta jumlah dari petugas penyuluh yang mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat nelayan dan petugas yang memiliki ilmu serta pengetahuan lebih terkait.

Itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Yang mana pada hakikatnya segala bentuk program ataupun kegiatan yang dilakukan sangat dibutuhkan adanya partisipasi serta kontribusi dari masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **3.5. Diskusi temuan utama penelitian**

Penerapan beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah banyak memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinanda Mesait Isir (2022) , bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dalam bentuk program memberikan penyuluhan, pendampingan dan kemitraan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif.

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis antara lain anggaran yang

masih terbatas, akses jarak perjalanan antar pelabuhan perikanan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan masih kurangnya minat serta motivasi masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan, kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemerintah menjadi fasilitator bagi masyarakat nelayan, pemerintah juga melaksanakan pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat nelayan serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur teknis Perikanan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti selama berada di lokasi penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah dibuat, namun secara keseluruhan sebagai bentuk pemberdayaan program-program tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari 4 lingkup pemberdayaan menurut Teori Mardikanto & Soebianto yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan, khususnya untuk Bina Kelembagaan, masyarakat nelayan masih enggan untuk bergabung ke dalam lembaga yang ada seperti kelompok nelayan, koperasi maupun organisasi lainnya.
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis antara lain anggaran yang masih terbatas, akses jarak perjalanan antar pelabuhan perikanan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan masih kurangnya minat serta motivasi masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh dinas.
3. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya pemerintah menjadi fasilitator bagi masyarakat nelayan, pemerintah juga melaksanakan pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat nelayan serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur teknis Perikanan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya. Penelitian. Dan juga kurangnya data pendukung tentang pemberdayaan masyarakat nelayan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Perlu dilakukan studi lanjutan yang lebih mendalam tentang dampak pemberdayaan masyarakat nelayan terhadap aspek sosial masyarakat nelayan Kabupaten Bengkalis. Kolaborasi dengan lembaga riset dan industri perikanan juga dapat mengembangkan program pemberdayaan yang lebih holistik dan berkelanjutan

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerjasama yang baik, pencapaian hasil yang bermanfaat untuk masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis tidak akan terwujud. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi positif yang berkelanjutan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian ini.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Endi, M. (2022). *Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung ....* repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/19866/>
- Isir, F. M. (2022). *Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Klaligi Kota Sorong.* eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/9094/>
- Jenawi, B., & Ferizone, A. J. (2019). Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah). *Dialektika Publik*. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/1360>
- Kamarullah, M. (2022). *Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.* repository.uir.ac.id. <https://repository.uir.ac.id/18508/>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik.* Alfabeta.
- Moleong, L. (n.d.). J.(2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. In *Bandung: Remaja Rosda Karya.*
- Mulyadi, S. (2005). *Masyarakat Nelayan.* Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sastrawidjaya. (2002). *Nelayan nusantara.* Pusat Riset Pengolahan Produk
- S. Arifianto., & Udi Rusadi. (2013). Pemberdayaan Nelayan Tradisional Melalui Media Empowerment of Traditional Fishermen Through of Communication Media. *Jurnal Masyarakat Telematik Dan Informasi*, 4(1), 13–26.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif.* digilib.unigres.ac.id. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show\\_detail&id=966&keywords=](https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=966&keywords=)
- Sugiyono, D. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).* eprints.upnyk.ac.id. <http://eprints.upnyk.ac.id/27727/1/Buku Metode Penelitian Komunikasi.pdf>
- Suharto, E. (2004). Dimensi–Dimensi Pemberdayaan. In *Bandung: Pt. Refika Aditama.*
- Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah pengembangan, evaluasi dan keberlanjutannya.* repository.ipb.ac.id. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54504>
- Wattimena, Z. K. R., Rustadi, R., & Suadi, S. (2022). Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung .... *Jurnal Ketahanan Nasional.* <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/72773>